

## Anwar Usman Dicapot dari Ketua MK, Jokowi: Itu Kewenangan Yudikatif

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mau menanggapi perihal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Jokowi mengaku tidak mau banyak berkomentar mengenai putusan tersebut. Presiden menilai putusan tersebut merupakan kewenangan dan wilayah hukum dari Yudikatif.

"Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi karena itu kewenangan di wilayah yudikatif," kata Jokowi di SMK Negeri 1 Purwakarta, Kec. Babakancikao, Purwakarta, Kamis (9/11).

Seperti diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Konstitusi Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari

jabatan Ketua MK.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor (Anwar Usman)," kata Ketua MKMK, Jimli Asshiddiqie saat membacakan putusan MKMK di ruang sidang MKMK, Gedung MK, Selasa (7/11).

MKMK menganggap Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan, dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

MKMK juga memerintahkan kepada Wakil Ketua MK untuk dalam waktu 2 x 24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ● han

## Senin, Calon Panglima akan Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi I DPR

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan, pihaknya akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin (13/11).

Hal ini diketahui setelah Komisi I DPR menggelar rapat internal terkait rencana fit and proper test calon Panglima. Rapat itu dilaksanakan setelah Badan Musyawarah (Bamus) DPR menggelar rapat, Rabu (8/11). Hasilnya, Komisi I ditugaskan untuk menggelar fit and proper test terhadap Agus.

"Jadi akan dimulai pagi dengan penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/11).

Meutya menuturkan, pihaknya juga bisa melakukan pendalaman secara tertutup jika memang ada hal yang disampaikan dalam fit and proper test perlu didalami dan sifatnya rahasia.

"Tapi dibuka dulu di awal untuk bisa diketahui publik semua apa visi misi dari calon panglima," jelasnya.

Sementara itu, Jumat (10/11), hari ini, Komisi I akan memulai verifikasi administrasi kepada Agus. Agus diharapkan melengkapi daftar riwayat hidup dan kelengkapan administrasi lainnya

seperti NPWP, KTP, Kartu Keluarga, LHKPN 2022 hingga SPT Pajak 2022.

Kemudian, Agus juga perlu menyertakan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

"Besok hanya internal jadi diterima dari pukul 10 pagi, sampai sore atau sampai kapanpun diperlukan untuk melengkapi. Jadi besok semuanya sudah harus lengkap data-data yang tadi saya sebutkan, supaya Senin itu kita bisa langsung mendengarkan paparan visi misi dari calon Panglima," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan bahwa Agus menjadi calon tunggal pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Hal ini berdasarkan isi surat presiden (Surpres) tentang calon panglima TNI yang diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara (Men-sesneg) Pratikno.

"Pimpinan DPR sudah menerima surpres dari presiden terkait dengan usulan pengganti calon panglima TNI yang diusulkan oleh presiden yang mana Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun," kata Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10) lalu. ● mei

## TNI AL akan Kirim Kapal Rumah Sakit untuk Bantu Rawat Warga Palestina

JAKARTA (IM) - Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL), Laksamana Muda TNI Denih Hendrata mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kapal bantu rumah sakit (KBRS) untuk dikirim ke Palestina.

"Angkatan Laut sedang menyiapkan, Insya Allah pasti dalam beberapa hari ini sedang direncanakan, dirapikan dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri dan lain lain," kata Denih di Mako Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta, Kamis (9/11).

"Kita akan siapkan jenis Kapal Rumah Sakit, karena ada dua fungsi yang akan nanti kita siapkan, yaitu untuk bentuk bakti kesehatan maupun bakti sosial," ujarnya.

Denih menjelaskan, pihaknya menyiapkan kapal Landing Platform Dock atau LPD sebagai kapal bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Namun, Denih belum dapat

memastikan kapan kapal tersebut dikirim, sebab pihaknya masih harus menunggu keputusan lebih lanjut.

"Jadi, sifatnya kita akan siapkan satu kapal kelas LPD. Dan kemudian nanti kita dibangkitkan atau tidak, menunggu keputusan lebih lanjut, karena AL bertugas untuk menyiapkan dan memberangkatkan saja pada saat ada perintah," ucapnya.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 tengah disiapkan untuk dikirim ke Palestina.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun telah meninjau KRI Radjiman Wedyodiningrat-992 di sela-sela acara penandatanganan nota kesepahaman atau MoU sistem elektronik berkas pidana terpadu atau e-berpadu antara TNI dan Mahkamah Agung (MA), Senin 6 November 2023.

"KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 sebagai salah satu kapal rumah sakit TNI dipersiapkan untuk merawat pengungsi korban perang dan akan bersiaga di perairan sekitar wilayah Gaza, Palestina," kata Julius Widjojono dalam keterangan resminya, Senin 6 November 2023. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## HAKIM KONSTITUSI SUHARTOYO TERPILIH JADI KETUA MK

Ketua MK terpilih Suharto (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Ketua MK Sadil Isra (kiri) usai memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11). Hakim Konstitusi Suharto terpilih menjadi Ketua MK melalui rapat pleno yang dihadiri sembilan hakim konstitusi untuk menggantikan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran berat kode etik.

# Dewas KPK Punya Kendala Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Firli Bahuri minta Dewas KPK menunda pemeriksaan terhadap dirinya selepas 8 November 2023. Namun Dewas menilai hal itu kelamaan.

JAKARTA (IM) - Dewas KPK menegaskan bahwa proses klarifikasi terhadap saksi-saksi untuk mengusut soal foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang dikaitkan dengan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian masih terus berjalan.

Hanya saja Dewas KPK menemukan kendala saat memanggil para saksi.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebutkan jadwal para saksi yang

dipanggil sering kali molor. Akibatnya, proses klarifikasi berjalan lama.

"Masih berproses klarifikasi saksi-saksi terus berlangsung. Kendala pemanggilan saksi-saksi. Jadwal sering molor," kata Haris kepada wartawan, Kamis (9/11).

Dewas KPK sebenarnya sudah bersiap-siap memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan (dkk) untuk mengusut laporan dugaan pelanggaran etik karena Firli bertemu Syahrul di lapangan (gedung) bulutangkis. Dewas akan memeriksa Firli dkk dari

pagi sampai sore.

Ternyata Firli tak datang pada Jumat (27/10). Firli minta jadwal pemeriksaannya diundur ke bulan depan.

"Pak Ketua KPK, Pak Firli, minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Alasannya belum diketahui, silakan tanya saja ke sana alasannya," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/10).

Alasan Firli tak datang adalah dia punya agenda lain yang harus dia penuhi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Yang kami ketahui masih ada beberapa agenda lain yang sedang dilakukan di kantor saat ini," kata Ali.

Setali tiga uang, tiga pimp-

inan KPK lainnya juga tidak bisa menghadiri panggilan Dewas KPK. Mereka adalah Alexander Marwata, Johanis Tanak, hingga Nawawi Pomolango.

### Dianggap Kelamaan

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mendapat informasi bahwa Firli minta jadwal pemeriksaannya ditunda selepas 8 November nanti. Namun, menurut Syamsuddin, penundaan sampai tanggal-tanggal itu sudah kelewatan.

"Beliau sih minta sesudah tanggal 8 (November). Bagi saya khususnya, tanggal 8 itu kejauhan, kelamaan," kata Syamsuddin.

Dewas KPK memang tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemanggilan paksa kepada pimpinan KPK. Namun dia berharap pemeriksaan terhadap Firli dilakukan sebelum 8 November.

"Bukan menolak (permintaan Firli diperiksa setelah 8

November). Sebaiknya sih sebelum itulah supaya cepat selesai, itu aja," katanya.

Syamsuddin mengatakan Dewas KPK juga memiliki target untuk segera menuntaskan dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan Firli dengan SYL.

"Kita di Dewas itu kan banyak yang dikerjakan. Kita Dewas ingin cepat-cepat selesai kasus-kasus ini," katanya.

Dari pimpinan KPK hanya Nurul Ghufon yang memenuhi panggilan Dewas KPK. Dia menyatakan tidak tahu soal pertemuan Firli dengan Syahrul di lapangan badminton itu.

"Apa materinya adalah permintaan klarifikasi berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran etik. Dua hal, pertama pemerasan. Kedua, pertemuan dengan pihak-pihak terkait. Itu yang dipertanyakan kepada saya," kata Ghufon di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/10). ● han

## KETUA BEM UI DIINTIMIDASI APARAT

# YLBHI: Jangan Sampai Terulang Kasus Penculikan di Masa Lalu

JAKARTA (IM) - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyoroti dugaan intimidasi yang menimpa Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, setelah mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat batas usia capres-cawapres.

Menurutnya, upaya intimidasi dan ancaman itu merupakan bentuk negara dari otoritarian.

"Ya ini adalah tanda-tanda dari ciri-ciri negara otoritarian, negara yang totaliter, yang tidak menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan tidak hormat dari masyarakat," kata Isnur saat dihubungi wartawan, Kamis (9/11).

Isnur merasa bahwa upaya intimidasi terhadap Melki

merupakan bentuk pembungkaman berekspresi.

"Dan ini sangat berbahaya bagi demokrasi, karena orang sekarang semakin takut berbicara, orang semakin takut bersuara," ujar Isnur.

Isnur mendorong, Pemerintah untuk mengusut aparat yang diduga telah melakukan intimidasi terhadap Ketua BEM UI.

"Dan tentunya kepolisian, tentara yang melakukan upaya-upaya surveillance, upaya intimidasi kepada keluarga dari BEM UI ini harus dicari tahu, harus diperiksa. Jangan sampai terulang kembali penculikan di masa lalu," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengaku mendapat beberapa kali ancaman yang mengarah ke intimidasi. Intimidasi

Juga dilakukan kepada ke orang tua maupun gurunya semasa SMA di Pontianak, Kalimantan Barat.

Melki selama ini diketahui sangat vokal mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia capres-cawapres.

"Ibu saya di rumah mendatangi aparat keamanan ada dari TNI-Polri menanyakan ke ibu saya, Melki biasa balik ke rumah kapan? Melki kegiatan dulu di rumah ngapain saja?" kata Melki saat ditemui di Lapangan Rotunda Kampus UI Depok, Jawa Barat, Selasa (7/11).

"Ibu komunikasi dengan Melki gimana? beberapa kali ditanyakan termasuk guru di sekolah saya. HP saya pun sudah beberapa kali ditelepon oleh aparat keamanan," katanya menambahkan. ● han

FOTO: ANTARA



**PENANDATANGANAN NPHD PENDANAAN PILKADA SERENTAK DI SUMSEL**  
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) menerima dokumen dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni (tengah) disaksikan Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan (kanan) usai penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Palembang, Sumsel, Kamis (9/11). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh 17 Kabupaten/Kota, KPU dan Bawaslu di Prov. Sumsel.

## Kejagung Geledah Kantor Notaris Terkait Kasus Korupsi Perumahan TNI AD

JAKARTA (IM) - Tim Penggeledahan Perkara Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM PIDMIL) bersama dengan Tim Kejaksan Negeri Karawang melakukan serangkaian pengeledahan dan penyitaan dua lokasi di Karawang, Jawa Barat.

"JAM Pidmil bersama dengan Tim Kejaksan Negeri Karawang, telah melakukan serangkaian pengeledahan dan penyitaan di 2 lokasi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Dua lokasi yang dilakukan penyitaan dan pengeledahan pada Selasa 7 November 2023 itu terkait kasus dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP-AD) tahun 2019 - 2020.

Dua lokasi yang digeluh yaitu Kantor Notaris/PPAT Tersangka TN, yang beralamat di Grand Taruma Ruko Dharmawa-

ngsa II Blok C Nomor 17, Karawang, Jawa Barat.

Selanjutnya, rumah tinggal tersangka TN, yang beralamat di Perumahan Grand Taruma Blok N2/B/06, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

"Dari kedua lokasi tersebut, tim penyidik berhasil memperoleh sekaligus menyita beberapa dokumen dan barang bukti, termasuk dokumen satu buah ruko milik tersangka AH yang dibuktikan dengan 1 lembar surat perjanjian dan 1 bundel Sertifikat HGB No. 01279, Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat beserta surat-surat lain," jelasnya.

Adapun pengeledahan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer Nomor: PRINT-357/PM.1/PMpd.1/11/2023 tanggal 6 November 2023 untuk mencari barang bukti dalam perkara dimaksud. ● mei

**MESIN DIJUAL**  
Satu Unit Mesin SCREW CAP 48 CAVITY, buatan ITALY merk SACMI. Lokasi Cibinong  
Satu Unit Mesin Preform Botol Plastic 96 CAVITY, buatan LUXEMBOURG (EUROPE) Merk HUSKY. Lokasi Cibinong  
Hubungi : SUFENDI  
Hp : 0896-6049-5611

**mandiri**  
**PENAWARAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)**  
Bawah dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan penjualan atau pengalihan piutang (Cessie) terhadap list debitur sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Jumlah Kewajiban Per Tgl 09/11/2023	Agunan Kredit
1.	Sucipto	Jl. Harapan Mulia VIII/12 Jakarta, RT 015 RW 011 Jakarta Pusat	Rp. 323.476.993.00	Jl. Warakas IV Gg. VI, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
2.	Mahrhan Nasution	Jl. Lantana II Blok L 6/39 RT 025/01 Perumahan Villa Melati Mas Desa Jelupang, Kec. Serpong Tangerang	Rp. 75.652.866.45	Jl. Cempaka Putih Barat 24 No. 1, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Apabila ada yang berminat dalam pengalihan kredit debitur di atas dapat menyampaikan penawaran secara tertulis ke alamat dibawah ini paling lambat tanggal 13 November 2023, jam 12.00 WIB.  
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Collection & Recovery Center Jakarta  
Collection & Recovery Center Jakarta  
Wisma Mandiri II Lt.17  
Jl. Kebon Sirih No.83, Jakarta 10340.  
Telp. 30023002 Ext. 7224983.  
Demikian untuk di ketahui semua pihak.  
Jakarta, 10 November 2023  
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk  
Collection & Recovery Center Jakarta